

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang temuan studi dari pembahasan dan analisis, kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang dirangkum dalam tujuan dan di capai melalui sasaran dan beberapa rekomendasi bagi kelanjutan pengembangan Kawasan Industri Suge agar keberadaannya memberikan manfaat bagi daerah, perusahaan dan masyarakat setempat. Selanjutnya mengingat terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis mengusulkan beberapa topik penelitian lanjutan untuk melengkapi dan menambah preferensi terkait pengembangan kawasan industri di masa yang akan datang.

### **5.1. Temuan Studi**

Dari uraian pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya diperoleh beberapa temuan di antaranya adalah sebagai berikut :

#### **5.1.1. Kondisi Perkembangan Kawasan Industri Suge**

Identifikasi dilakukan dengan observasi lapangan dan studi dokumen pada Dinas Perindustrian terkait, hasilnya bahwa terdapat beberapa temuan terkait tidak berkembangnya Kawasan Industri Suge antara lain: belum optimalnya pengelolaan Kawasan Industri Suge, adanya pembatasan industri pertambangan, kurangnya kerjasama pemerintah swasta dan belum adanya dokumen Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIK). Selanjutnya evaluasi lokasi Kawasan Industri Suge menggunakan parameter Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri. Berdasarkan pengamatan lapangan dan hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai rata-rata seluruh parameter adalah 1,23 atau dapat dikategorikan bahwa lokasi Kawasan Industri Suge memenuhi standar teknis. Hal ini sejalan dengan hasil Uji Hipotesis berdasarkan persepsi responden yang menyatakan bahwa seluruh parameter data statistik menunjukkan  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima yang artinya seluruh parameter statistik memiliki hubungan atau pengaruh terhadap variabel tetap yaitu lokasi kawasan industri.

### **5.1.2. Permasalahan Pemilihan Lokasi KIS Berdasarkan Persepsi Pemerintah dan Perusahaan**

#### **a. Persepsi Responden terhadap Faktor Pemilihan Lokasi KIS**

Identifikasi permasalahan pemilihan lokasi KIS diperoleh dengan menyebarkan angket atau kuisioner kepada pegawai di pemerintah daerah sebanyak tiga belas orang dan perusahaan industri menengah dan besar sebanyak tiga puluh tiga perusahaan. Faktor pemilihan lokasi dikelompokkan ke dalam delapan variabel utama yaitu: infrastruktur, aksesibilitas, lokasi, fasilitas, ekonomi, regulasi, pelayanan dan aglomerasi, temuannya adalah sebagai berikut:

1. Variabel infrastruktur secara keseluruhan memiliki nilai rata-rata 3,35 (setuju) untuk pemerintah dan 3,55 (setuju) untuk perusahaan atau secara kumulatif kondisi infrastruktur dapat mendukung pengembangan kawasan industri.
2. Variabel aksesibilitas memiliki nilai rata-rata 4,17 (sangat setuju) untuk pemerintah dan 3,65 (setuju) untuk perusahaan, hal tersebut mengindikasikan bahwa kondisi aksesibilitas saat ini sangat mendukung dalam pengembangan kawasan industri.
3. Variabel lokasi secara keseluruhan bernilai rata-rata 4,07 (sangat setuju) untuk pemerintah dan 3,48 (setuju) untuk perusahaan sehingga kondisi lokasi saat ini dapat dikatakan sangat mendukung dalam pengembangan kawasan industri.
4. Variabel fasilitas memiliki nilai tengah yang dominan yaitu 3,19 (tidak tahu/netral) untuk pemerintah dan 3,00 (tidak tahu/netral) untuk perusahaan, artinya fasilitas yang ada belum bisa dinilai karena kondisinya belum terbangun, dengan demikian fasilitas yang ada tidak mendukung dalam pengembangan kawasan industri.
5. Variabel ekonomi memiliki nilai rata-rata sebesar 3,65 (setuju) untuk pemerintah dan sebesar 3,30 (tidak tahu/netral) untuk perusahaan atau tidak menilai. Hal tersebut diartikan bahwa kondisi ekonomi saat ini dapat mendukung pengembangan kawasan industri, namun bagi perusahaan ekonomi daerah belum menjamin keamanan investasi karena dipengaruhi banyak faktor dan bersifat dinamis.
6. Variabel regulasi memiliki nilai rata-rata sebesar 3,52 (setuju) untuk pemerintah dan 3,13 (tidak tahu/netral) untuk perusahaan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa regulasi yang ditetapkan pemerintah mendukung pengembangan kawasan industri namun sebaliknya bagi perusahaan karena

umumnya mereka tidak mengetahui/memahami regulasi yang ada, hal ini karena kurangnya sosialisasi.

7. Variabel pelayanan memiliki nilai rata-rata 3,15 (tidak tahu/netral) untuk pemerintah dan 3,25 (tidak tahu/netral) untuk perusahaan, hal ini cukup beralasan karena KIS belum memiliki pelayanan atau manajemen pengelola yang independen (masih bergabung dengan SKPD teknis), sehingga variabel pelayanan belum sepenuhnya mendukung pengembangan kawasan industri.
8. Variabel aglomerasi memiliki nilai rata-rata 3,53 (setuju) untuk pemerintah dan 3,23 (tidak tahu/netral) untuk perusahaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa persepsi pemerintah beranggapan pemusatan industri dalam kawasan mendukung pengembangan sektor industri namun sebaliknya bagi perusahaan bahwa aglomerasi bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah *supply and demand* serta pola produksi dan distribusi bagi industri setempat. Oleh karena itu aglomerasi belum mendukung pengembangan Kawasan Industri Suge.

#### **b. Persepsi Pemerintah dan Perusahaan terhadap Pengembangan KIS**

Secara umum persepsi pemerintah dan perusahaan memiliki nilai rata-rata diatas 2,70 (setuju dan sangat setuju), nilai tersebut dapat diartikan bahwa rencana pengembangan KIS memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, konservasi lingkungan, bermanfaat bagi masyarakat, meningkatkan laba perusahaan, menjamin layanan berinvestasi dan keberlanjutan berusaha bagi perusahaan. Pemerintah dan perusahaan memiliki persepsi yang sama bahwa kebijakan rencana pengembangan KIS memberikan dampak yang positif bagi perkembangan daerah dan industri lokal. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada perbedaan persepsi dalam menilai rencana pengembangan KIS di Kabupaten Belitung, karena kepentingan masing-masing responden akan terakomodasi dalam kawasan industri.

#### **5.1.3. Faktor yang Berpengaruh terhadap Pengembangan KIS**

Analisis dilakukan terhadap empat puluh dua indikator atau parameter yang diperoleh dari literatur dan standar normatif yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator tersebut adalah jaringan jalan lingkungan, jaringan air bersih, jaringan energi, jaringan air limbah, jaringan jalan utama, jaringan

telekomunikasi, jarak ke bandara, jarak ke pelabuhan, angkutan umum, kondisi fisik lahan, ketersediaan lahan, jarak ke kota/pasar, jarak ke permukiman, jarak ke sungai, peruntukan lahan, luas lahan, fasilitas kenyamanan, prasarana penunjang, harga lahan, peluang investasi, kerjasama pemerintah swasta, pajak, sosialisasi, intensif, jaminan keamanan, iklim investasi, pengelola kawasan industri, dukungan legislative, regulasi, kejelasan aturan, kemudahan perizinan, kelengkapan sarana/prasarana, kewajiban pengusaha, industri sejenis, kemitraan dgn industri lokal, upah pekerja, skill pekerja, asal bahan baku, supplier, biaya angkutan, letak pasar dan biaya hidup

Setelah dilakukan analisis faktor dengan menggunakan program aplikasi SPSS. 16 diperoleh tujuh faktor utama yang berpengaruh terhadap pengembangan Kawasan Industri Suge. secara berturut-turut dari nilai yang paling berpengaruh yaitu yang pertama adalah faktor lahan, selanjutnya faktor lokasi, regulasi, manajemen, infrastruktur, dukungan eksternal dan aksesibilitas.

## **5.2. Kesimpulan**

Dari temuan dan hasil analisis sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Kawasan Industri Suge hingga saat ini tidak menunjukkan perkembangan, ini terlihat dari jumlah perusahaan yang berinvestasi hingga tahun 2017 tidak mengalami penambahan namun sebaliknya. Hal ini terjadi karena belum optimalnya pengelolaan KIS sehingga kewajiban penyediaan sarana dan parasana infrastruktur belum maksimal, selanjutnya adalah adanya pembatasan terhadap eksploitasi mineral tambang yang mengakibatkan tersendatnya suplai bahan baku sektor industri timah dan kaolin. Selain itu belum optimalnya kerjasama pemerintah dan swasta menyebabkan sektor industri belum menjadi pilar penggerak perekonomian daerah, dan kurangnya dukungan pemerintah mengakibatkan penganggaran sektor industri daerah mengalami persoalan utamanya dalam hal pengembangan Kawasan Industri Suge.

Kesimpulan lain dalam hal penetapan Kawasan Industri Suge sebagaimana dalam RTRW Kabupaten Belitung telah sesuai ketentuan standar normatif yang ada, namun karena kurang mendapat dukungan pemerintah dan tidak dilanjutkan dengan implementasi pembangunan sebagai bagian dari proses perencanaan yang utuh maka KIS tidak menarik minat investor sehingga tidak berkembang sebagaimana mestinya. Penyebabnya adalah kondisi status lahan yang masih

tumpang tindih dengan kepemilikan masyarakat, lokasi KIS yang berada jauh dari jangkauan pusat distribusi nasional/regional, regulasi daerah yang belum sepenuhnya memihak sektor industri, belum adanya manajemen atau otoritas pengelola kawasan yang mandiri. Selain itu kondisi infrastruktur dan prasarana kawasan yang belum terbangun dan kurangnya dukungan eksternal dari perusahaan lokal serta kesulitan dalam aksesibilitas (transportasi laut) karena belum beroperasinya pelabuhan regional yang telah dibangun sebelumnya, menambah permasalahan mendasar dalam pengembangan KIS.

Hal tersebut menyiratkan bahwa pemerintah daerah hanya memenuhi kewajiban sebagaimana Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengamanatkan bahwa kegiatan industri harus terpusat dalam satu kawasan, namun tidak memperhitungkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan kawasan industri. Dalam manajemen rantai pasokan (*Supply Chain Management*) pada KIS menjadi isu perencanaan yang kurang menarik karena regulasi, infrastruktur prasarana dan fasilitas kawasan serta manajemen/perusahaan kawasan industri belum tersedia sebagaimana mestinya. Selain itu dalam lingkungan bisnis, determinasi lokasi dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang paling optimum dimana kondisi Kawasan Industri Suge saat ini belum mampu memenuhi hal-hal tersebut.

### **5.3. Rekomendasi**

Dalam rangka mengatasi permasalahan terkait pengembangan Kawasan Industri Suge di Kabupaten Belitung maka terdapat beberapa rekomendasi atau langkah-langkah yang dapat di ambil agar penetapan Kawasan Industri Suge dapat bermanfaat bagi pertumbuhan daerah dan masyarakat setempat.

#### **1. Malaksanakan Pembebasan Lahan**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2013-2034, bahwa Kawasan Industri Suge ditetapkan seluas 1.414 ha. Dengan demikian sudah seharusnya lahan tersebut segera dibebaskan agar peruntukannya menjadi kawasan prioritas pengembangan sektor industri di daerah. Kejelasan status dan penguasaan lahan agar menjadi milik pemerintah ini penting dilakukan agar mempermudah dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya. Dalam tahap

pembebasan lahan yang dilakukan yaitu sosialisasi, pengukuran/pemetaan, menyepakati nilai ganti rugi, membayar lahan dan memprioritaskan masyarakat setempat untuk ikut bekerja atau berusaha. Selanjutnya menetapkan anggaran ganti rugi berdasarkan dengan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat setempat yang terdampak, melalui sistem pembayaran bertahap hingga selesai.

## **2. Optimalisasi Lokasi**

Sebagaimana diketahui bahwa KIS berada di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kondisi geografi berupa wilayah kepulauan, maka menjadi isu yang kurang menarik untuk dijadikan lokasi kawasan industri terkait jangkauan distribusi yang memerlukan biaya transportasi laut dan jarak yang cukup jauh dari pusat distribusi nasional, sehingga menjadi permasalahan sekaligus tantangan tersendiri dalam pengembangan kawasan industri. Untuk itu diperlukan optimalisasi lokasi KIS dengan melakukan promosi kawasan dalam mendukung industri yang paling potensial dan menguntungkan bagi para investor. Dalam optimalisasi lokasi harus diiringi dengan pembangunan infrastruktur dan penyediaan lahan yang siap bangun dan kemudahan dalam aksesibilitas menuju kawasan perlu menjadi perhatian utama dalam pengembangan KIS.

## **3. Memperkuat Regulasi Industri Daerah**

Sering ditemukan fakta dilapangan bahwa jika terjadi pergantian kepemimpinan daerah, maka kebijakan pendahulunya tidak dilanjutkan, sehingga hal tersebut menjadi suatu hambatan. Untuk itu dalam mendukung pengembangan kawasan industri maka regulasi daerah hendaknya diperkuat dengan memprioritaskan pengembangan sektor industri yang potensial dan berkelanjutan. Diperlukan komitmen/dukungan eksekutif dan legislatif agar mengakomodasi kepentingan pembangunan Kawasan Industri Suge dalam Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) maupun Menengah/RPJM, sehingga legalitas atau regulasi yang ditetapkan dalam hal pengembangan sektor industri memiliki arahan yang jelas dan target yang dapat dicapai secara realistis.

## **4. Membentuk Badan Pengelola KIS**

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, bahwa pengelolaan Kawasan Industri dapat dilakukan oleh suatu lembaga berbadan hukum. Untuk itu sangat direkomendasikan membentuk/menunjuk badan pengelola kawasan yang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan hingga pembangunan dan operasionalisasi kawasan industri

serta mengkomodasi kepentingan perusahaan yang berinvestasi dalam KIS. Badan usaha dapat berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi atau badan usaha lainnya.

### **5. Menyediakan Infrastruktur**

Penyediaan infrastruktur kawasan industri merupakan implementasi dari kegiatan perencanaan yang telah ditetapkan. Pembangunan fisik prasarana dan sarana serta fasilitas kawasan adalah seperti jaringan jalan, drainase, air bersih, telekomunikasi, listrik dan perkantoran yang akan digunakan untuk beraktivitas pengelola atau manajemen kawasan industri. Selain itu penyiapan kavling atau lahan yang akan dibangun pabrik harus disediakan secara terencana dan sesuai dengan master plan kawasan industri. Infrastruktur yang memadai dan mendukung berjalannya aktivitas industri menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengusaha yang akan berinvestasi dalam Kawasan Industri Suge.

### **6. Menjalin Dukungan Eksternal**

Jika melihat potensi dan daya tarik investasi Kabupaten Belitung masih cukup menjanjikan, data dinas terkait mencatat hingga Tahun 2017 terdapat tujuh puluh perusahaan yang mengajukan ijin prinsip usaha industri dengan investasi rencana lebih dari Rp 5,9 triliun. Peluang tersebut sudah seharusnya di kelola dengan baik yaitu dengan menjalin kemitraan antara pemerintah dan perusahaan lokal baik dalam pengelolaan personalia (sistem pengupahan), bahan baku, pemasaran maupun promosi potensi industri yang berkembang. Selain itu permasalahan masing-masing institusi agar dikelola dengan bijaksana, agar kontinuitas investasi dapat terjaga sehingga menguntungkan bagi semua pihak.

### **7. Membangun Aksesibilitas yang Memadai**

Melihat kondisi yang ada maka sudah seharusnya pelabuhan Tanjung Batu dan segala fasilitasnya segera difungsikan untuk menggantikan pelabuhan Kota Tanjungpandan sebagai gerbang utama akses keluar masuk bahan baku dan hasil produksi bagi industri-industri yang akan beroperasi. Selain itu akses menuju bandara hendaknya juga diperhatikan, mengingat pergerakan dalam kegiatan bisnis memiliki mobilitas yang sangat tinggi, sehingga jarak bandara dan KIS diperpendek dengan memperbaiki kondisi akses utama agar lebih baik. Dengan demikian aktivitas ekonomi, perdagangan dan jasa dipastikan akan terjadi pada kawasan tersebut sehingga berdampak terhadap meningkatnya fungsi kawasan

sebagai pusat kegiatan industri atau pergudangan dan dalam jangka panjang menjadi *prime mover* bagi perkembangan perekonomian daerah.

#### **8. Usulan Penelitian Lanjutan**

Untuk melengkapi keterbatasan dari penelitian ini dan mendukung rekomendasi diatas, maka penulis mengusulkan beberapa penelitian lebih lanjut antara lain :

- a. Studi potensi pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dalam mendukung implementasi pembangunan Kawasan Industri Suge.
- b. Kajian pengembangan pelabuhan Tanjung Batu sebagai feeder pelabuhan Tanjung Priok dalam mendukung Kawasan Industri Suge.

PERPUSTAKAAN PLANOLOGI